

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu bagian penting dalam mencapai tujuan pendidikan adalah melalui kurikulum. (Maksudin & Nurani, 2018, p. 46). Kurikulum di Indonesia digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar pada berbagai jenis dan tingkat sekolah. (Maksudin & Nurani, 2018, p. 46). Menurut buku yang diterbitkan UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation*) hampir berpuluh-puluh tahun pakar pendidikan menaruh perhatian yang meningkat terhadap kurikulum. Kurikulum adalah cakupan berbagai rencana kegiatan anak didik yang terperinci, macam-macam bahan pendidikan, saran-saran strategi belajar, pengaturan-pengaturan program agar dapat diterapkan. (Lewy, 1983). Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum perlu diperhatikan, termasuk oleh Negara. Karena memiliki peran sebagai instrumen strategis untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang, kurikulum sekolah juga memiliki koherensi yang amat dekat dengan upaya pencapaian tujuan sekolah atau tujuan pendidikan. (Maksudin & Nurani, 2018, p. 74). Dari Syaibani (1979: 406) tujuan pendidikan yaitu tujuan yang tidak ujungnya, yaitu dengan mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat.

Salah satu penyebab rendahnya hasil belajar peserta didik adalah kurikulum yang tidak sesuai dengan ketertarikan peserta didik (Maesaroh, 2013, p. 151), padahal kurikulum sifatnya dinamis baik secara nasional ataupun

lembaga yang memiliki visi misi tertentu (Tamin, 2018, p. 13). Menurut Irsyad, sejarah perubahan kurikulum di Indonesia sejak tahun 1945, yaitu pada tahun 1947 (dengan nama Kurikulum Rencana Pelajaran), 1952 (dengan nama Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai), 1964 (dengan nama Kurikulum Rencana Pendidikan), 1968, 1975, 1984, 1994, (yang masing-masing menggunakan tahun sebagai nama kurikulum), 2004 (dengan nama Kurikulum Berbasis Kompetensi), 2006 (dengan nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), dan yang terbaru adalah kurikulum 2013 atau yang lebih dikenal dengan sebutan K-13 (Hermawan, Juliani, Widodo, & Yogyakarta, 2020, p. 36).

Pada realitanya, berbagai aspek yang kurang mendukung menjadikan kurikulum di Indonesia masih memiliki kekurangan. Diantaranya, dari guru, sarana prasarana pendidikan, teknologi dan informasi yang kurang memadai dan lain sebagainya (Amalia Rachman, 2020 p. 7). Kemudian penelitian yang dilakukan Nasihin, keterbatasan informasi mengenai sistem kurikulum, kurangnya fasilitas pembelajaran yang menjadi unsur utama yaitu buku-buku siswa, tidak tersedia sarana prasarana belajar yang utama untuk mendukung penerapannya seperti; laboratorium, alat-alat peraga, media pembelajaran dan kompetensi profesionalisme guru belum memadai, hal ini juga menjadi masalah dalam merealisasikan kurikulum secara baik dan benar di sekolah (Nasihin, 2016, p. 84).

Masalah kurikulum terbagi menjadi dua, yaitu secara umum dan khusus. Secara umum, masalah kurikulum terdapat pada delapan kelompok, yaitu bidang cakupan, relevansi, keseimbangan, integrasi, sekuensi, kontinuitas, artikulasi, dan kemampuan transfer (*transfrability*). Sedangkan secara khusus, masalah kurikulum diantaranya dalam tujuan dan hasil, isi dan organisasi. proses dan penyusunan (Sulfemi, 2018, p. 20-31). Julaeha menambahkan bahwa kurikulum di Indonesia sering berubah nama, namun tidak memperhatikan esensi dari pengembangan kurikulum tersebut, bahkan kurikulum di Indonesia juga cenderung kompleks, yang mengakibatkan pendidik dan peserta didik kewalahan akan tujuan yang harus dicapai, pada akhirnya peserta didik sulit menerima

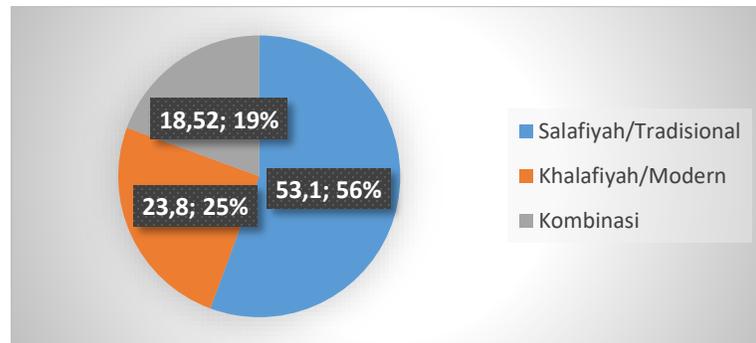
materi yang dipelajari (Julaeha, 2019, p. 174). Selain itu, adanya anggapan dari kalangan masyarakat bahwa kurikulum hanya sebagai alat yang menjadi dasar dalam pendidikan saja. Padahal jika kita lebih mengkaji makna dari kurikulum, kurikulum merupakan konsep yang kompleks dalam proses pendidikan (Hermawan, Juliani, Widodo, & Yogyakarta, 2020 p. 36).

Jika kita melihat kualitas lulusan juga, hal ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi lembaga yang berwenang untuk merumuskan kurikulum Indonesia yang memiliki tujuan jangka panjang, tentunya agar menyesuaikan dengan perkembangan zaman (Amalia Rachman, 2020, p. 8). Dengan begitu, tujuan dari perencanaan pembelajaran melalui kurikulum akan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia (Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, 2010, p. 19)

Peran kurikulum sangatlah strategis dalam pembaharuan sistem lembaga pendidikan formal. Karena melalui kurikulum, peserta didik disiapkan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi, persaingan yang ketat, dan penyesuaian kebutuhan masyarakat (Lazwardi, 2017, p. 107).

Lembaga pendidikan melaksanakan programnya dengan sistem, yaitu kurikulum. Dengan kurikulum lembaga pendidikan akan mewujudkan kualitas peserta didik yang dibutuhkan oleh masyarakat (Sulfemi, 2018, p. 1). Lembaga yang khas dari Indonesia, bahkan awal kemunculannya di Indonesia adalah pesantren (Solichin, 2011, p. 28). Pesantren merupakan jenis lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, memiliki peran penting dalam membentuk karakter atau menginternalisasi nilai-nilai kepada masyarakat baik secara individu atau kelompok (Afi Farkhan Masrur, 2018, p. 83). Ia mempunyai tradisi yang stabil dan akar yang cukup kuat, karna telah menempuh beberapa abad lamanya. Kehadirannya di tengah masyarakat telah memberikan keberagaman yang khas sebagai sumbangan bagi kemajuan umat Islam, khususnya di Indonesia (Tohari, 1997, p. 24). Dari data analisis yang dilakukan oleh Kementrian Agama berdasarkan jenis, pesantren terbagi menjadi tiga yaitu, pesantren *Salafiyah* atau tradisional sebanyak 14.459 (53,10 %), *Khalafiyah* atau modern sebanyak 7.727

(23,8%), dan kombinasi sebanyak 5.044 (18,52%). Maka jumlah totalnya adalah 26.775 pesantren.



Dari data diatas menunjukkan bahwa di Indonesia, pesantren *Salafiyah* merupakan pesantren yang paling banyak, disusul oleh pesantren *Khalafiyah* dan yang paling sedikit itu adalah jenis kombinasi (Kemenag, 2012, p. 70).

Selain menjadikan santrinya sebagai kader-kader Muslim yang *tafaqquh fi al-dîn*, pesantren juga mampu mencetak Muslim yang dapat melaksanakan inovasi khususnya pendidikan untuk menyesuaikan tantangan zaman (Solichin, 2011, p. 43). Moh. Nurhakim berpendapat bahwa santri juga perlu berperan penting dalam kemajuan masyarakat khususnya umat Islam. (Nurhakim, 2011, p. 88).

Berbeda dengan Umiarso dan Masruroh dalam bukunya yang berjudul *Modernisasi Pendidikan Islam ala Azyumardi Azra*, dijelaskan bahwa ada seorang pemikir Islam yaitu M. Dawam Rahardjo (salah satu tokoh pemikir Islam Indonesia) menyatakan pesantren adalah lembaga yang kuat mempertahankan keterbelakangan dan tertutupan, (Masruroh & Ninik, 2012, p. 210) kemudian adanya pandangan orientalis seperti Snouch Hurgronje, melihat pesantren adalah lembaga yang memiliki tradisi yang statis dan waktu yang longgar karena menggunakan system sorogan, wetonan, atau halaqoh. (Nurhakim, 2011, p. 91). Selain itu, keberlangsungan pesantren memang banyak sekali mendapat tantangan dan rintangan, yaitu sejak masa kolonial Belanda, masa kemerdekaan, masa Orde Baru, hingga sekarang. Bahkan mendapat kesan buruk dan membedakan peran pesantren sebagai lembaga pendidikan. (Solichin, 2011, p.

30). Termasuk fakta di lapangan, masih ada juga pesantren yang anti dengan dunia modern yang berkembang sekarang dan masih bertahan dengan ketradisionalannya, melarang santrinya untuk bersekolah di sekolah formal, dan masih ada pula pesantren yang membatasi santrinya dengan dunia luar termasuk teknologi. Sehingga masih banyak output pesantren yang begitu keluar dari pesantren gagap dengan dunia yang dihadapinya (Hayati, 2015 p. 98). Mengutip dari Nurhakim :

Menurut K.H. Imam Zarkasyi bahwa masalah pesantren masa lalu yaitu tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas. Maksudnya, tujuan yang dapat dituangkan dalam tahapan-tahapan rencana kerja atau program. Pendidikan berjalan hanya mengikuti perkembangan alamiah masing-masing pesantren, dan tidak memiliki tujuan yang spesifik. Masalah ini memang perlu pembaharuan. (Nurhakim, 2011 p. 88).

Perawironegoro juga menyebutkan yang menegaskan suatu temuan masalah dalam proses pendidikan pesantren yaitu terkait dengan beberapa hal; kurikulum, metode pembelajaran, sarana dan prasarana, administrasi, dan pembelajaran yang pasif. (Perawironegoro, 2019, hal 130).

Dari berbagai paparan tersebut dapat difahami bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan khas Indonesia dengan beragam model. Pesantren memiliki pengaruh bagi perkembangan pendidikan masyarakat dalam pengembangan diri baik secara kognitif , afektif maupun psikomotor. Namun, beberapa tokoh beranggapan bahwa lembaga pesantren tidak dapat mencetak manusia yang unggul sesuai zaman. Sedangkan menurut Masrur dari Ahmad Daehari, pesantren juga harus mampu meningkatkan peran kelembagaannya sebagai wadah generasi muda Islam dalam menimba ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bekal menghadapi era globalisasi. (Afi Farkhan Masrur, 2018, p. 6).

Hal yang menjadi dasar dalam keberlangsungan lembaga pendidikan adalah melalui kurikulum, termasuk lembaga pendidikan pesantren. Namun di lapangan, kurikulum pesantren yang diterapkan masih banyak kelemahan-kelemahan terutama dalam tujuan yang dicapai, metode pembelajaran, dan

materi pembelajaran yang kurang tersusun. Selain itu, kurikulum pesantren khususnya *Salafiyah* tidak terstruktur dari segi penjadwalan dalam kegiatannya seperti mengaji karena disesuaikan dengan jadwal Kiai. Santri yang kurang disiplin, tidak ada pengawasan intensif dari Kiai dan tidak adanya evaluasi pembelajaran secara keberlanjutan (Amirudin & Rohimah, 2020, p. 270). Berbeda dengan pesantren modern yang sudah beradaptasi dengan perkembangan zaman (Nurmela, Rifa'i, & Herman, 2016, hal 391), Perubahan pada setiap zaman dan institusi pendidikan merupakan sebuah keniscayaan, dalam kaitanya dengan pengembangan kurikulum dan pengembangan kelembagaan pesantren (Tamin, 2018, p. 9). Maka dari itu pondok pesantren memiliki kelebihan dalam manajerial sistem pendidikannya termasuk dalam kurikulum (Nurhakim, 2011, p. 86)

Salah satu tokoh pendidikan Indonesia yang berpengaruh dalam sistem pendidikan Islam yang modern dan berasrama di Indonesia adalah K.H. Imam Zarkasyi. Bahkan seorang tokoh pendidikan Islam lainnya, yaitu Abudin Natta memberi pengakuan bahwa K.H. Imam Zarkasyi merupakan Ulama asal Indonesia yang mampu mengatasi masalah pendidikan Islam yang dianggap masih kuno (Yapono*, 2015 p. 293), dengan ide cemerlangnya yaitu pembaharuan pesantren yang menerima modernitas. KH Imam Zarkasyi menggagas pembaharuan kurikulum pesantren, yaitu 100% ilmu agama dan 100% ilmu umum (Nurhakim, 2011 p. 88), pelaksanaannya melalui *Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyyah* (KMI) (Mu'minah, 2015 p. 114).

Para peneliti telah memberikan fokus yang optimal terhadap pendidikan pesantren secara umum, namun tidak spesifik kepada salah satu instrument keberhasilan pendidikan yaitu melalui kurikulum pesantren, terutama pembaharuan kurikulum pesantren melalui KMI yang dilakukan oleh seorang tokoh pendidikan Islam Indonesia yaitu K.H. Imam Zarkasyi. Oleh karena itu, penulis akan mengungkap kurikulum pesantren modern yang digagas oleh K.H. Imam Zarkasyi.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah **“Konsep Kurikulum Pesantren Modern perspektif K.H. Imam Zarkasyi”**.

Dari fokus masalah penelitian diatas, dapat dijabarkan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1.2.1 Apa konsep kurikulum pesantren modern perspektif K.H. Imam Zarkasyi?

1.2.2 Bagaimana implementasi kurikulum pesantren modern perspektif K.H. Imam Zarkasyi?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Mendeskripsikan konsep kurikulum pesantren perspektif K.H. Imam Zarkasyi

1.3.2 Mendeskripsikan implementasi kurikulum pesantren modern perspektif K.H. Imam Zarkasyi

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

1.4.1.1 Upaya pengumpulan informasi terkait kurikulum pesantren modern perspektif K.H. Imam Zarkasyi

1.4.1.2 Menambah pengetahuan tentang perkembangan modernisasi kurikulum pesantren.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Memberikan sumbangan bagi setiap lembaga pendidikan khususnya islam dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan situasi dan kondisi agar tujuan pendidikan tercapai seiring perkembangan zaman.

1.4.2.2 Memberikan referensi kepada pendidik dalam keberlangsungan pembelajaran baik secara teori atau praktik untuk peserta didik.

1.4.2.3 Menjadi rujukan penelitian selanjutnya.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mengklasifikasikan setiap bab, yang mana susunannya adalah sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

BAB II merupakan kajian pustaka, yang berisi kajian teori yang diambil dari berbagai literatur, baik itu sumber primer ataupun sumber sekunder serta sumber yang mendukung kepada pembahasan penelitian.

BAB III merupakan metode penelitian yang meliputi, metode penelitian tersebut, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV merupakan hasil penelitian yaitu pembahasan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB V merupakan kesimpulan, implikasi dan rekomendasi